

PERSEPSI PENERAPAN KEBIJAKAN KUOTA DAN DAMPAKNYA BAGI NELAYAN LOKAL DALAM SKEMA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DI KEPULAUAN BANDA

Perceptions of Quota Policy Implementation and Its Impacts on Local Fishers within the Measured Fishing Scheme in the Banda Islands

Ruslan H.S. Tawari¹, Putri Hastari^{2*}, Haruna¹

¹Program Studi Pemanfaatan Sumber daya Perikanan-Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura
Jl. Mr. Chr. Soplanit, Kampus Poka Ambon Maluku 97233 Indonesia

²Program Studi Magister Ilmu Kelautan, Pascasarjana Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon

Email Corresponding : *putrihastari58@gmail.com

Abstract

The quota-based Measured Fishing Policy (PIT) is a new initiative designed to comprehensively reform national fisheries governance. This policy is expected to have significant impacts on small-scale fishers, who are often vulnerable to policy changes due to their socio-economic and technical conditions. Local fishers' understanding and acceptance of this policy are considered as key factors for the implementation success at the grassroots level. This study aims to identify the socio-economic and technical characteristics of local fishers and to analyze their perceptions of the quota policy implementation and its potential impacts on local fishers within the measured fishing scheme in the Banda Islands. The research was conducted in eight villages across three islands in the Banda Islands, Central Maluku Regency, Maluku Province. Data were collected from September to December 2024 by interviewing 95 respondents who purposively selected from local fishers. Data were analyzed using descriptive quantitative and qualitative methods with a Likert scale approach. The results show that the majority of respondents are in the productive age group, possess low levels of formal education, earn less than IDR 1,000,000 per month, and use conventional fishing gear. In terms of perception, understanding of the PIT policy remains relatively low (36.84% in the "low" category). However, most fishers expressed support for the quota policy's implementation, especially when local customary institutions and fishing communities involve in the process. They consider that the policy possibly improve fish stock availability, operational efficiency, and income levels. This study recommends to conduct socialization, education, and technical assistance in conjunction to increase the effectiveness of policy implementation and the policy inclusive for small-scale fishers in the Banda Islands.

Keywords: fisheries governance, resource sustainability, fisher participation, coastal economy.

Abstrak

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota merupakan inisiatif baru yang dirancang untuk mereformasi tata kelola perikanan nasional secara menyeluruh. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap nelayan skala kecil yang memiliki kondisi sosial ekonomi dan teknis yang rentan terhadap perubahan. Pemahaman dan penerimaan nelayan lokal terhadap kebijakan ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi dan teknis nelayan lokal serta menganalisis persepsi penerapan kebijakan kuota dan dampaknya bagi nelayan lokal dalam skema penangkapan ikan terukur di Kepulauan Banda. Penelitian ini dilakukan di delapan desa yang tersebar di tiga pulau di Kepulauan Banda, Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Data dikumpulkan selama bulan September hingga Desember 2024 melalui kuesioner kepada 95 responden nelayan lokal yang dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas nelayan berada dalam kelompok usia produktif, memiliki tingkat pendidikan rendah, penghasilan di bawah Rp1.000.000 per bulan, dan menggunakan alat tangkap sederhana. Dari sisi persepsi, pemahaman terhadap kebijakan PIT masih tergolong rendah (36,84% kategori kurang), tetapi mayoritas nelayan menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan kuota, terutama jika melibatkan lembaga adat dan komunitas lokal. Mereka menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketersediaan ikan, efisiensi operasional, dan pendapatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis agar implementasi kebijakan PIT berjalan efektif dan inklusif bagi nelayan kecil di wilayah Kepulauan Banda.

Kata kunci: tata kelola perikanan, keberlanjutan sumber daya, partisipasi nelayan, ekonomi pesisir.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan luas wilayah laut mencapai lebih dari 6,4 juta km². Sektor perikanan tangkap berperan penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir (Sangadji *et al*, 2025). Masih tingginya tekanan terhadap sumber daya perikanan seperti penangkapan berlebih (*overfishing*), praktik ilegal, *unreported and unregulated* (IUU) *fishing*, serta lemahnya sistem tata kelola perikanan menyebabkan penurunan kualitas ekosistem laut dan ketersediaan stok ikan di beberapa wilayah pengelolaan perikanan (Fauzi, 2005; Suman *et al*, 2016; Radjak *et al*, 2021; Ritonga *et al*, 2024).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, wilayah perairan Maluku mencakup WPP 714 (Laut Banda), 715 (Laut Seram dan sekitarnya), dan 718 (Laut Arafura dan Timor bagian Timur) memiliki potensi sumber daya ikan besar tetapi tingkat pemanfaatannya tidak merata. Di WPP 714, tingkat pemanfaatan lobster telah melampaui ambang batas (1,7), sedangkan di WPP 718 cumi-cumi berada dalam status *overfishing* (1,28). Kondisi pemanfaatan ikan pelagis besar, khususnya tuna, cakalang, dan tongkol, tidak dirinci dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 karena jenis-jenis tersebut dikelola khusus melalui mekanisme regional dan sering menjadi bagian dari pengaturan berbasis organisasi internasional seperti WCPFC (*Western and Central Pacific Fisheries Commission*). Sejumlah literatur dan laporan kajian lain tentang kondisi pemanfaatan pelagis besar dunia termasuk di Indonesia menunjukkan tekanan yang mengarah pada *fully-exploited* hingga *over-exploited* (Garcia & Rosenberg, 2010; FAO, 2020; Akbar, 2022; FAO, 2024).

Berdasarkan kondisi tantangan yang dikemukakan diatas, sehingga Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zona yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 (Trenggono, 2023). Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan dari sistem berbasis input (izin dan ukuran kapal) menuju sistem berbasis output (kuota tangkapan) dengan tujuan utama untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut, sekaligus memberikan kepastian usaha serta keadilan ekonomi bagi para pelaku perikanan. Kebijakan PIT merupakan bagian dari upaya transisi menuju pengelolaan perikanan berbasis ekonomi biru yang menyeimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi (Trenggono, 2023). Kementerian Kelautan dan Perikanan merumuskan kebijakan ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan, sekaligus menggantikan pendekatan kebijakan lama yang bersifat konvensional (Nasution & Wicaksono, 2023).

Kebijakan PIT mengatur kuota penangkapan ikan di zona Penangkapan Ikan Terukur terdiri atas kuota industri, kuota lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial. Dalam skema ini, pemerintah menetapkan batas tangkapan maksimum (*catch limit*) berdasarkan jenis ikan, zona tangkap, dan kapasitas kapal. Khusus untuk Kuota Nelayan Lokal di setiap provinsi pada zona penangkapan ikan terukur sampai 12 mil laut dengan mempertimbangkan paling sedikit jumlah nelayan, jumlah dan ukuran Kapal Penangkapan Ikan, Jumlah Alat Penangkapan Ikan, dan produksi ikan hasil tangkapan. Kebijakan ini juga menargetkan efisiensi dalam pungutan negara, khususnya melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi. Berbeda dari sistem sebelumnya, PNBP kini ditarik setelah kegiatan penangkapan dilakukan, bukan di awal usaha, sehingga lebih adil dan berbasis pada realisasi hasil tangkapan. Meskipun implementasi kebijakan kuota belum sepenuhnya dijalankan, tetapi penerapan mekanisme PNBP pasca produksi telah terlebih dahulu diimplementasikan sebagai bagian dari transisi kebijakan pengelolaan perikanan (Nurlaela *et al*, 2025).

Kebijakan ini memiliki potensi untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan perikanan, namun implementasinya di tingkat lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (Goethel *et al*, 2023). Penelitian Poltak *et al*. (2024) menunjukkan meskipun sebagian nelayan mendukung PIT, namun kekhawatiran terhadap dampak ekonomi jangka pendek tetap ada. Di sisi lain, penelitian Zulham *et al*. (2022) menekankan pentingnya pengorganisasian nelayan kecil dalam koperasi agar dapat mengakses kuota secara adil. Gerungan *et al*, (2024) menyoroti lemahnya

strategi komunikasi pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan ini, sementara Luthfia (2023) mencatat adanya ketimpangan dalam implementasi PIT yang cenderung berpihak pada kepentingan industri.

Secara geografis, Kepulauan Banda terletak di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 yang masuk dalam Zona 3 Penangkapan Ikan Terukur, dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi keragaman sumber daya ikan yang tinggi namun tingkat pemanfaatannya setiap tahunnya cenderung berfluktuasi (Adrianto, 2015; Haruna *et al*, 2022). Dampak *overfishing* dan penurunan stok ikan berdampak langsung pada nelayan lokal, terutama di perairan negara berkembang termasuk perairan Laut Banda. Dari perspektif sosial ekonomi, wilayah ini didominasi oleh komunitas nelayan lokal skala kecil yang sangat bergantung pada aktivitas penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama dengan pilihan alternatif ekonomi yang terbatas. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut menjadikan masyarakat di Banda sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan perikanan terutama kebijakan yang mengatur kuota dan zonasi penangkapan seperti PIT. Nelayan kecil sering kali menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan berbagai kebijakan (Gerungan *et al*, 2024; Nurlaela *et al*, 2025), oleh karena itu kebijakan kuota dan pengelolaan perikanan yang kompleks dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap kebijakan tersebut.

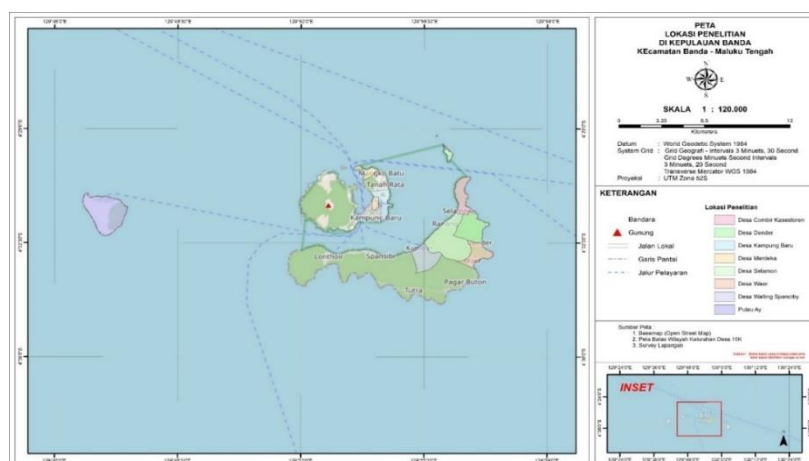
Karakteristik geografis Kepulauan Banda menyebabkan terbatasnya akses terhadap informasi, teknologi, serta infrastruktur pendukung perikanan. Kondisi ini memicu kesenjangan pemahaman dan pelaksanaan antara kebijakan yang dirumuskan pada tingkat pusat dengan realitas sosial-ekonomi di tingkat lokal. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) telah resmi diperkenalkan oleh pemerintah sebagai instrumen pengelolaan perikanan berbasis kuota dan zonasi, implementasinya hingga saat ini masih terbatas pada mekanisme penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi. Komponen utama lainnya seperti pembatasan kuota, pengaturan zonasi penangkapan, dan kewajiban pendaratan ikan di pelabuhan tertentu belum diterapkan secara menyeluruh.

Penelitian terkait kebijakan PIT, khususnya dari sisi sosial seperti persepsi dan respons masyarakat nelayan masih tergolong baru dan minim di eksplorasi dalam literatur ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menggali persepsi nelayan lokal di Kepulauan Banda terhadap penerapan kebijakan kuota dalam skema PIT. Penelitian ini akan mengkaji dampak potensial kebijakan tersebut terhadap aspek sosial, ekonomi, dan operasional kegiatan perikanan masyarakat setempat, termasuk potensi resistensi, penyesuaian strategi penangkapan, serta akses terhadap pasar dan pelabuhan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik sosial ekonomi dan teknis nelayan lokal serta menganalisis persepsi penerapan kebijakan kuota dan dampaknya bagi nelayan lokal dalam skema penangkapan ikan terukur di Kepulauan Banda. Manfaat penelitian untuk memberikan informasi empiris yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi implementasi kebijakan PIT yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi nelayan lokal, khususnya di wilayah kepulauan seperti Banda.

MATERI DAN METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2024 yang berlokasi di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Lokasi pengambilan data berada pada 3 Pulau di 8 Desa, masing-masing untuk Pulau Banda yaitu Desa Kumber, Waer, Dender, Salomon, Walang, di Pulau Neira Desa yaitu Merdeka dan Kampung Baru serta Pulau Ay terdapat di Desa Ay (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas nelayan, wawancara terstruktur dengan para responden, serta diskusi mendalam yang membahas secara spesifik tentang implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di wilayah Kepulauan Banda. Tujuan dari proses ini adalah untuk menggali pemahaman, sikap, dan tanggapan nelayan lokal terhadap kebijakan tersebut dalam konteks sosial, ekonomi, dan operasional mereka sehari-hari.

Jumlah responden dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Sangadji *et al.*, 2025), yaitu suatu metode statistik yang umum digunakan untuk menghitung ukuran sampel ketika jumlah populasi diketahui dan diinginkan tingkat presisi tertentu. Rumus ini digunakan untuk memastikan jumlah sampel yang diambil mewakili populasi secara proporsional dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) yang dapat diterima. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan *margin of error* sebesar 10% serta mengacu pada populasi nelayan aktif sebanyak 1.918 orang di Kepulauan Banda, maka diperoleh ukuran sampel sebanyak 95 orang responden nelayan.

Pemilihan responden menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik *non-probability sampling* dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Mulyana *et al.*, 2024). Dalam penelitian ini, responden dipilih adalah nelayan lokal skala kecil yang aktif melakukan penangkapan ikan dan memiliki pemahaman atau pengalaman langsung terhadap perubahan kebijakan perikanan, khususnya kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Dari 95 responden yang diwawancarai berasal dari berbagai latar belakang jenis alat tangkap, usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman melaut, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai karakteristik sosial ekonomi serta tingkat pemahaman dan persepsi mereka terhadap implementasi kebijakan PIT. Distribusi jumlah sampel dari setiap Desa dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi sampel responden pada 8 Desa di Kepulauan Banda

No	Desa	Total Sampel	Pancing Ulur Tuna	Gillnet	Pancing Ikan Dasar	Bubu	Purse Seine
1	Kumber	10	5	3	2	0	0
2	Waer	10	5	2	2	1	0
3	Dender	10	2	4	3	1	0
4	Selamon	10	2	2	3	3	0
5	Walang	15	5	5	3	1	1
6	Ay	10	6	1	2	0	1
7	Merdeka	15	4	5	4	1	1

8	Kampung Baru	15	3	6	3	1	2
Total		95	32	28	22	8	5

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menyusun dan mengolah data yang diperoleh agar dapat dipahami secara lebih mudah dan tersistematis (Achjar et al, 2023). Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan skala Likert dengan fokus pada data kualitatif (Pescaroli et al, 2020) yang dikumpulkan di lokasi penelitian di Kepulauan Banda.

Analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh melalui wawancara langsung. Analisis ini bertujuan menggambarkan kondisi nyata berdasarkan satu atau lebih variabel, seperti karakteristik sosial ekonomi nelayan, dan operasional penangkapan ikan. Data disajikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk mempermudah pemahaman, dan diolah menggunakan *Microsoft Excel* dengan pengelompokan kategori secara kualitatif. Analisis skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyusun sejumlah pernyataan yang dijawab berdasarkan tingkat persetujuan. Dalam penelitian ini, digunakan tiga kategori jawaban: Sangat Setuju (SS) diberi bobot 3, Setuju (S) bobot 2, dan Kurang Setuju (KS) bobot 1 (Tabel 2).

Tabel 2. Instrumen Skala Likert

No	Skala Pengukuran	Bobot
1	Sangat Setuju (SS)	3
2	Setuju (S)	2
3	Kurang Setuju (KS)	1

Analisis deskriptif kuantitatif adalah metode pengolahan data berbasis angka yang dapat dihitung atau diukur, dan digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena yang sedang berlangsung secara objektif dalam bentuk data numerik (Sudjana, 2004). Analisis ini dilakukan secara sederhana dengan menggunakan rumus perhitungan statistik dasar sebagai berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Frekuensi}}{\text{Total}} \times 100$$

Dimana:

Frekuensi = Jumlah jawaban responden

Total = Total seluruh responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sosial Ekonomi dan Teknis Nelayan Lokal

Data hasil survei menggambarkan bahwa mayoritas nelayan responden berada pada kelompok usia 36–45 tahun sebanyak 51 orang (53,68%), usia 46–55 tahun sebanyak 37 orang (38,94%). Kelompok usia muda (25–35 tahun) hanya berjumlah 6 orang (6,32%), sedangkan yang berusia di atas 56 tahun hanya 1 orang (1,06%) dari total 95 responden (Tabel 3). Nelayan di wilayah studi didominasi oleh kelompok usia produktif dan menengah (36–55 tahun). Dominasi usia produktif ini sejalan dengan penelitian Sangadji et al, (2025) yang menyebutkan bahwa nelayan pancing ulur tuna di Kecamatan Tehoru Maluku Tengah berada pada rentang usia produktif sebesar 62,5% merupakan usia yang paling aktif dalam kegiatan perikanan, karena memiliki kekuatan fisik yang relatif stabil serta pengalaman yang cukup dalam melaut. Hal ini juga didukung oleh Sabilla et al, (2024) yang menyatakan bahwa nelayan usia menengah cenderung lebih terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan nelayan usia tua.

Tabel 3. Karakteristik Sosial Nelayan berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	25 – 35 Tahun	6	6.32%
2	36 – 45 Tahun	51	53.68%
3	46 – 55 Tahun	37	38.94%

4	> 56 Tahun	1	1.06%
Total		95	100%

Rendahnya jumlah nelayan muda mencerminkan menurunnya minat generasi muda terhadap profesi nelayan, karena dianggap tidak menjanjikan, berat secara fisik, serta minim inovasi teknologi. Minimnya nelayan berusia di atas 56 tahun menunjukkan bahwa nelayan lanjut usia umumnya sudah tidak aktif melaut atau telah beralih ke pekerjaan lain yang lebih ringan. Rendahnya jumlah nelayan muda mencerminkan menurunnya minat generasi muda terhadap profesi nelayan akibat perubahan preferensi kerja, di mana pekerjaan ini dianggap berat, berisiko tinggi, kurang stabil secara ekonomi, dan tidak sejalan dengan gaya hidup modern yang berbasis teknologi. Generasi muda cenderung memilih pekerjaan di sektor formal yang lebih bergengsi dan menjanjikan mobilitas sosial yang lebih baik (Mambang *et al.*, 2022; Cooke *et al.*, 2023), kurangnya inovasi di sektor perikanan juga turut memperkuat ketidaktertarikan ini (Muslimin & Anggareni, 2018, Espinoza-Tenorio *et al.*, 2022).

Tabel 4 menunjukkan bahwa dominan nelayan lokal di Kepulauan Banda tidak tamat SD sebesar 49 responden (51.57%), diikuti dengan tidak tamat SMA sebesar 36 responden (37.90%), sementara responden dengan Tingkat Pendidikan tamat SMP yang memiliki frekuensi terendah sebanyak 10 responden (10.53%). Hal ini menunjukkan bahwa nelayan lokal di Kepulauan Banda didominasi oleh nelayan dengan Tingkat Pendidikan rendah yakni tidak tamat SD (Far-Far & Tuhumury, 2022).

Tabel 4. Karakteristik Nelayan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	49	51.57%
2	Tidak Tamat SMP	10	10.53%
3	Tidak Tamat SMA	36	37.90%
Total		95	100%

Mayoritas nelayan dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan rendah tidak tamat SD yang mencerminkan keterbatasan dalam pemahaman kebijakan dan akses terhadap informasi perikanan. Rendahnya pendidikan berdampak pula pada partisipasi yang minim dalam kelembagaan perikanan dan adaptasi terhadap program seperti Penangkapan Ikan Terukur (D'agata *et al.*, 2020), serta menghambat akses terhadap program bantuan dan inovasi usaha perikanan (Efani *et al.*, 2021).

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh bahwa mayoritas nelayan di Banda memiliki jumlah anggota keluarga 4–6 orang (60%), yang mencerminkan tingginya beban tanggungan rumah tangga. Jumlah anggota keluarga yang besar berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan ekonomi, terutama untuk pangan, pendidikan, dan kesehatan (Adhitya *et al.*, 2022). Kondisi ini dapat menurunkan ketahanan pangan rumah tangga jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai (Vianna *et al.*, 2020; Onyenekwe *et al.*, 2022).

Tabel 5. Karakteristik Sosial Nelayan Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

No	Jumlah Anggota Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
1	1 – 3 orang	28	29.47 %
2	4 – 6 orang	57	60 %
3	7 – 10 orang	10	10.53 %
Total		95	100%

Pada Tabel 6 dapat dijelaskan sebanyak 68,42% nelayan memiliki penghasilan di bawah Rp1.000.000 per bulan, dan sisanya (31,58%) berpenghasilan antara Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000. Tidak ada nelayan dengan penghasilan di atas Rp3.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan dan berada di bawah garis kesejahteraan minimum. Ketidakpastian hasil tangkapan, musim penangkapan yang fluktuatif, dan keterbatasan

akses pasar menjadi penyebab rendahnya pendapatan nelayan (Tawari *et al*, 2019). Rendahnya pendapatan nelayan seringkali mendorong anggota keluarga, terutama istri, untuk ikut bekerja guna menopang kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya intervensi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis perikanan, tetapi juga strategi peningkatan kesejahteraan nelayan melalui diversifikasi usaha, pelatihan, dan penguatan ekonomi keluarga (Sangadji *et al*, 2025).

Tabel 6. Karakteristik Ekonomi Nelayan Berdasarkan Penghasilan

No	Penghasilan	Frekuensi	Persentase (%)
1	< Rp. 1.000.000	65	68.42%
2	Rp 1.000.000 – Rp. 3.000.000	30	31.58%
3	Rp 3.000.000 – Rp. 5.000.000	0	0%
4	> Rp. 5.000.000	0	0%
Total		95	100

Sebagian besar nelayan 82,10% memiliki akses terhadap kredit bertujuan untuk meningkatkan usaha perikanan melalui pembiayaan (Tabel 7). Akses ini penting karena dapat mendorong produktivitas dan keberlanjutan usaha nelayan. Efektivitasnya sangat tergantung pada kemampuan dalam mengelola dana pinjaman. Menurut Cineretta (2017) pelayanan kredit yang optimal dapat meningkatkan keberhasilan usaha, termasuk dalam koperasi nelayan. Oleh karena itu, dukungan literasi keuangan dan pendampingan sangat diperlukan agar pemanfaatan kredit benar-benar dapat mendukung kesejahteraan nelayan.

Tabel 7. Karakteristik Ekonomi Nelayan Berdasarkan Akses Kredit

No	Kredit	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	78	82.10%
2	Tidak ada	17	17.90%
Total		95	100

Berdasarkan Tabel 8 dapat jelaskan bahwa karakteristik teknis nelayan didominasi penggunaan kapal *fiber* berukuran kecil (<5 GT) dengan panjang rata-rata 10 meter dan lebar 1-2 meter. Seluruh kapal memiliki daya angkut kurang dari 500 kg dan hampir semuanya menggunakan motor tempel 2-tak. Biaya perawatan mesin per bulan tergolong rendah, mayoritas di bawah Rp100.000. Ciri ini mencerminkan bahwa nelayan di Kepulauan Banda merupakan nelayan skala kecil dengan keterbatasan modal dan teknologi yang cenderung melakukan penangkapan di wilayah pesisir dan bergantung pada musim serta kondisi cuaca. Armada kapal (<5 GT) umumnya membatasi jangkauan tangkapan dan ketahanan saat menghadapi cuaca buruk, sehingga berdampak pada produktivitas dan keberlanjutan usaha (Ikhsan & Arkham, 2020; Tawari *et al*, 2020). Keterbatasan teknis ini menjadi tantangan utama dalam peningkatan kapasitas dan daya saing nelayan kecil di wilayah terpencil seperti Banda.

Tabel 8. Karakteristik Teknis

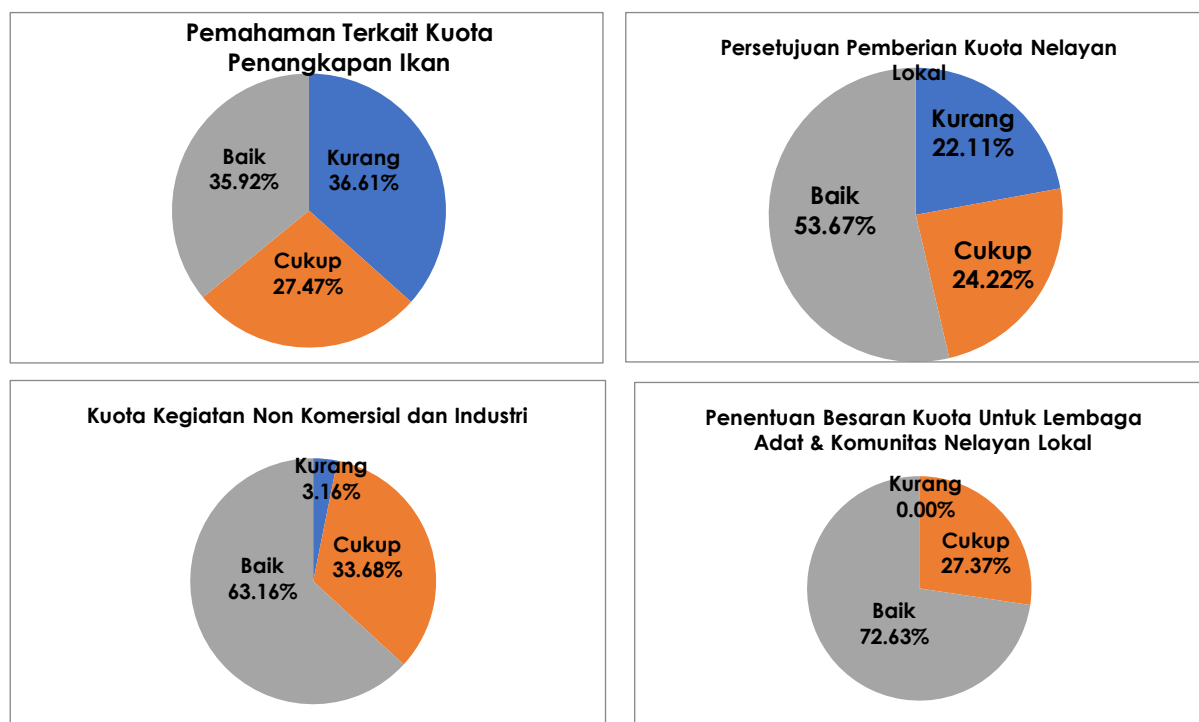
Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kapal		
Kapal Fiber	90	94.73%
Kapal Kayu Tradisional	5	5.26%
Panjang Kapal		
<5 meter	14	14.74%
10 meter	81	85.27%
Lebar Kapal		
< 1 meter	5	5.26%
1-2 meter	90	94.73%
Muatan Kapal		

<500 kg	95	100%
Jenis Mesin		
Motor tempel 2-tak	90	94.73%
Sampun	5	5.26%
Ukuran Kapal		
<5 GT	95	100%
Perawatan Mesin Kapal		
Setiap Bulan	95	100%
Biaya Perawatan Mesin Kapal		
<Rp. 100.000	67	70.53%
Rp. 100.000 – Rp.500.000	28	29.47%

Persepsi Nelayan Terhadap Penerapan Kebijakan PIT Kuota

Kebijakan PIT yang diatur dalam Permen KP No. 28 Tahun 2023 merupakan pendekatan baru pengelolaan sumber daya perikanan berbasis kuota bertujuan menjaga keberlanjutan stok ikan dan memajukan ekonomi masyarakat pesisir secara berkeadilan. Kuota penangkapan dibagi menjadi tiga kategori utama: kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota untuk kegiatan non-komersial (Pasal 4 ayat 1). Khusus untuk nelayan lokal, alokasi kuota diberikan untuk wilayah tangkap hingga 12 mil laut dan dikelola oleh gubernur provinsi (Pasal 4 ayat 3, Pasal 21–24).

Hasil penelitian di Kepulauan Banda (Gambar 2) menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan ini sejalan dengan prinsip tata kelola berkelanjutan, implementasinya masih menghadapi tantangan di tingkat lokal. Data survei mengungkapkan bahwa 36,61% nelayan masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap kebijakan kuota, sementara hanya 35,92% yang memahami dengan baik. Meskipun kebijakan khusus kuota dalam skema PIT belum secara resmi diterapkan, namun hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan sudah mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan mekanisme kebijakan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan sejak tahap awal sosialisasi yang kemungkinan disebabkan terbatasnya informasi yang diterima nelayan serta kompleksitas administratif kebijakan.



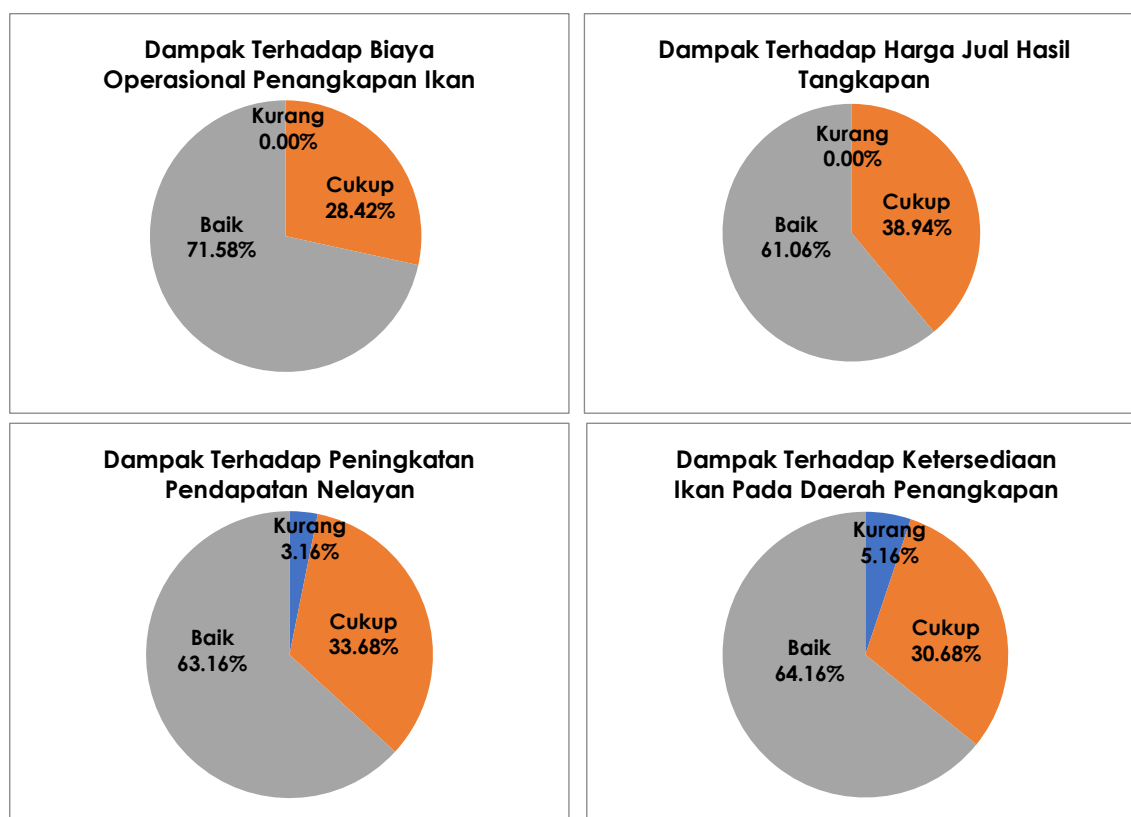
Gambar 2. Persepsi Nelayan Terhadap Penerapan Kebijakan Kuota

Dukungan terhadap kebijakan cukup tinggi, terutama terhadap alokasi kuota untuk nelayan lokal (53,67% setuju) dan distribusi kuota non-komersial (63,16% setuju). Persepsi positif juga terlihat terhadap keterlibatan komunitas lokal dan lembaga adat dalam menentukan kuota sebesar 72,63% responden menyatakan dukungan penuh. Ini menunjukkan bahwa nelayan bersedia menerima sistem kuota apabila pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara partisipatif, sesuai amanat Permen KP Pasal 33 tentang fasilitasi berupa bimbingan teknis, penyuluhan, dan pendampingan.

Persepsi yang baik ini tidak selalu menjamin efektivitas kebijakan, mengingat kendala teknis seperti minimnya pemahaman regulasi seperti yang termuat pada Pasal 22 dan 30, keterbatasan akses pada sistem informasi kuota, serta lemahnya kapasitas kelembagaan lokal. Oleh karena itu, pelibatan aktif pemerintah daerah, koperasi nelayan, dan lembaga pendidikan lokal menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan implementasi (Pasal 33 dan 36). Minimnya sosialisasi, akses informasi, serta tingkat pendidikan nelayan yang umumnya rendah menjadi faktor yang mempengaruhi keterbatasan pemahaman ini (Far-Far & Tuhumury, 2022; Efani *et al*, 2021). Menurut Wulandari *et al*, (2023) bahwa nelayan kecil sering bersikap rasional dan selektif terhadap kebijakan yang dianggap belum memberikan kejelasan manfaat langsung atau membebani operasional mereka, seperti syarat administratif yang tidak ramah bagi komunitas nelayan skala kecil. Faktor teknis dan sosialisasi menjadi krusial dalam menjembatani pemahaman dan kepatuhan nelayan terhadap kebijakan baru tersebut (Nurlaela *et al*, 2025).

Persepsi Dampak Kebijakan PIT Kuota Terhadap Nelayan Lokal

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan pendekatan kuota merupakan kebijakan baru yang terus disiapkan implementasinya oleh pemerintah sebagai bagian dari reformasi tata kelola perikanan nasional. Walaupun kebijakan ini belum diimplementasikan secara penuh, penting untuk mengetahui bagaimana respons dan persepsi nelayan lokal sebagai pihak yang akan terdampak langsung. Persepsi nelayan terhadap dampak PIT dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Dampak Kebijakan Kuota Terhadap Nelayan Lokal

Pada Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa mayoritas nelayan menyatakan persepsi yang cenderung positif jika kebijakan ini diterapkan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Sebagian besar responden, yaitu lebih dari 60%, menilai bahwa kebijakan kuota berpotensi memberikan dampak yang baik terhadap efisiensi biaya operasional, peningkatan harga jual hasil tangkapan, dan pendapatan mereka. Sebanyak 64,16% nelayan meyakini bahwa kebijakan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan ketersediaan stok ikan di wilayah penangkapan. Meskipun kebijakan tersebut belum diterapkan, nelayan memiliki harapan bahwa penerapan kuota dapat menciptakan sistem penangkapan ikan yang lebih teratur, berkelanjutan, dan menguntungkan secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya pengelolaan berbasis kuota sebagai instrumen untuk menghindari *overfishing* dan memastikan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi perikanan (Syaifullah *et al*, 2024; Suherman *et al*, 2025).

Antisipasi terhadap tantangan implementasi tetap penting dilakukan terutama bagi nelayan kecil yang rentan terhadap perubahan tata kelola. Meskipun persepsi awal menunjukkan dukungan, perhatian harus diberikan pada distribusi kuota agar tidak hanya menguntungkan pelaku usaha berskala besar. Pramoda & Apriliani (2019) menekankan bahwa kejelasan definisi nelayan kecil dan perlindungan akses terhadap wilayah tangkap adalah faktor penting dalam penerapan kebijakan berbasis kuota. Oleh karena itu, meski potensi manfaat kebijakan kuota cukup menjanjikan, pemerintah perlu merancang implementasi yang inklusif, adil, dan berbasis partisipasi aktif masyarakat nelayan agar kebijakan ini benar-benar berdampak positif secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Nelayan lokal di Kepulauan Banda umumnya berasal dari kelompok usia produktif, memiliki pendidikan rendah, penghasilan terbatas, serta menggunakan alat tangkap sederhana. Pemahaman nelayan terhadap kebijakan kuota dalam skema Penangkapan Ikan Terukur (PIT) masih rendah, tetapi mayoritas memiliki persepsi positif terhadap penerapannya, terutama jika kebijakan ini menjamin keadilan akses dan melibatkan lembaga adat serta komunitas lokal. Nelayan menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, harga jual, pendapatan, dan ketersediaan ikan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan PIT perlu didukung oleh sosialisasi yang masif, edukasi berkelanjutan, dan pendampingan yang menyentuh langsung kebutuhan nelayan kecil agar kebijakan ini benar-benar berdampak positif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adhitya, B., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288-295.
- Adrianto, L. A. (2015). Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan Untuk Perikanan Berkelanjutan di Indonesia.
- Akbar, I. (2022). Literature review pemanfaatan sumber daya kelautan untuk sustainable development goals (SDGS). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(1).
- Cineretta, R., Wibowo, B. A., & Wijayanto, D. (2017). Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Mino Saroyo Dalam Usaha Peremberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. *Jurnal Perikanan Tangkap: Indonesian Journal of Capture Fisheries*, 1(02).
- Cooke, S. J., Fulton, E. A., Sauer, W. H., Lynch, A. J., Link, J. S., Koning, A. A., & Gillanders, B. M. (2023). Towards vibrant fish populations and sustainable fisheries that benefit all: learning from the last 30 years to inform the next 30 years. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 33(2), 317-347.
- D'agata, S., Darling, E. S., Gurney, G. G., McClanahan, T. R., Muthiga, N. A., Rabearisoa, A., & Maina, J. M. (2020). Multiscale determinants of social adaptive capacity in small-scale fishing communities. *Environmental Science & Policy*, 108, 56-66.

- Efani, A., Manzilati, A., & Rahman, M. S. (2021). Adopsi nelayan terhadap kredit keuangan skala kecil. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(2), 97-102.
- Espinoza-Tenorio, A., Ehuano-Noh, R. G., Cuevas-Gómez, G. A., Narchi, N. E., Ramos-Muñoz, D. E., Fernández-Rivera Melo, F. J., & Torre, J. (2022). Between uncertainty and hope: Young leaders as agents of change in sustainable small-scale fisheries. *Ambio*, 51(5), 1287-1301.
- FAO, F. (2020). Tracking Progress on Food and Agriculture-Related SDG Indicators 2020.
- FAO. (2024). In Brief to The State of World Fisheries and Aquaculture 2024. Blue Transformation in action. Rome. <https://doi.org/10.4060/cd0690en>
- Fauzi, A. (2005). Kebijakan perikanan dan kelautan: isu, sintesis, dan gagasan. Gramedia Pustaka Utama.
- Far-Far, R. A. F., & Tuhumury, S. F. (2022). Strategi adaptasi masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim di kepulauan kei besar maluku tenggara. *J. Akuatiklestari*, 6(1), 53-61.
- Garcia, S. M., & Rosenberg, A. A. (2010). Food security and marine capture fisheries: characteristics, trends, drivers and future perspectives. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 365(1554), 2869-2880.
- Gerungan, K. K. I., Darmastuti, R., & Kristiyani, D. N. (2024). Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (Studi Kasus Nelayan Kota Tegal). *Scriptura*, 14(1), 1-13.
- Goethel, D. R., Omori, K. L., Punt, A. E., Lynch, P. D., Berger, A. M., de Moor, C. L., & Methot, R. D. (2023). Oceans of plenty? Challenges, advancements, and future directions for the provision of evidence-based fisheries management advice. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 33(2), 375-410.
- Haruna, Tupamahu, A., Tawari, R.H.S., Siahainenia, S.R., Trisnadi, A., & Wamnebo, M. I. (2022). Eksplorasi Penangkapan Ikan dengan Pancing Ulur Tuna Madidihang Skala Kecil *Jurnal Airaha*, 11(02).
- Ikhsan, S. A., & Arkham, M. N. (2020). Karakteristik Perikanan Tangkap Di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(2), 107-116.
- Luthfia, S. S. (2023). Mengupas tata kelola perikanan nasional melalui PP No. 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur demi mewujudkan blue economy. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
- Mambang, S. P. C., Marleny, F. D., Ansari, N. H., Baddrudin, A., Yenitia, A., Dixky, M., ... & Salsabila, T. (2022). E-Padi berbasis android untuk meningkatkan minat generasi muda pada sektor pertanian. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi*, 5(1).
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., ... & Martono, S. M. (2024). Metode penelitian kualitatif. Penerbit Widina.
- Muslimin, S., & Fitra Anggareni, S. (2018). Eksistensi Panrita Lopi: Studi Tentang Sulitnya Regenerasi Pengrajin Kapal Pinisi Di Kecamatan Bonto Bahari. *Jurnal Patrawidya*, 19(2), 143-160.
- Nasution, A. M., & Wicaksono, V. A. (2023). The Political Economy of Fisheries Development During Joko Widodo's Regime. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 141-164.
- Nurlaela, E., Ripaldi, M., Saputra, A., Choerudin, H., & Nababan, S. P. (2025). Efektivitas Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Dan Mekanisme PNBP Pasca Produksi Di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Jawa Tengah. *ALBACORE J. Penelitian Perikanan Laut*, 9(2), 155-173.
- Onyenekwe, C. S., Okpara, U. T., Opat, P. I., Egyir, I. S., & Sarpong, D. B. (2022). The triple challenge: Food security and vulnerabilities of fishing and farming households in situations characterized by increasing conflict, climate shock, and environmental degradation. *Land*, 11(11), 1982.
- Pescaroli, G., Velazquez, O., Alcántara-Ayala, I., Galasso, C., Kostkova, P., & Alexander, D. (2020). A Likert scale-based model for benchmarking operational capacity, organizational resilience, and disaster risk reduction. *International Journal of Disaster Risk Science*, 11, 404-409.
- Poltak, H., Ndahwali, D. H., Gunaisah, E., Karubaba, O. C., & Purnomo, A. (2024). Persepsi nelayan terhadap penangkapan ikan terukur ditinjau dari aspek sosial ekonomi dan lingkungan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 9(3), 249-264.
- Pramoda, R., & Apriliani, T. (2019). Kajian hukum kebijakan ukuran kapal dalam definisi nelayan kecil. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(2), 143-156.

- Radjak, S. A., Tupamahu, A., Tuapetel, F., Haruna, H., & Tawari, R. H. (2021). Utilization and surveillance of Fisheries Tuna Resources as a Basis for Prevention of IUU Fishing in Seram Sea. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 14(1), 135-140.
- Ritonga, K.S., Herman, E., Simanjorang, F. (2024). Analisis Strategi Kolaboratif Pencegahan Destructive Fishing di Wilayah Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5(1), 185-199
- Sabilla, D. P., Heriyanti, L., & Djakfar, L. (2024). Peran Perempuan Pesisir Dalam Mendukung Ekonomi Keluarga Nelayan: Studi di Malabero, Teluk Segara, Bengkulu. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 10(2), 190-211.
- Sangadji, M., Pattimahu, T. V., Haruna & Tawari, R.H.S. (2025). Household Income Diversification Strategy for Tuna Fishermen in Tehoru District, Central Maluku Regency, Indonesia. *Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries*. Vol. 29(2): 2931 – 2944 (2025).
- Sudjana. (2004). *Metoda Statistika*. Bandung: PT. Tarsito.
- Suherman, A., Hernuryadin, Y., Suadela, P., Furkon, U. A., & Amboro, T. (2025). Transformation of Indonesian capture fisheries governance: Review and prospects. *Marine Policy*, 174, 106619.
- Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., & Amri, K. (2016). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 97-100.
- Syaifullah, T., Saptono, A., & Purnawa, D. (2024). Eksplorasi Metode Sroi Sebagai Alat Pengukuran Dampak Program Kelautan Perikanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 16(1), 61-71.
- Tawari, R. H. S., Paillin, J. B., Haruna, H., Siahainenina, S., Sangadji, S., & Angkotasan, A. (2020). Tradisi dan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 16(1), 19-27.
- Tawari, R. H., Simbolon, D., & Haruna, H. (2019). Productivity of Small-Scale Yellowfin Tuna Fishing in West Region of Ceram District, Moluccas Province, Indonesia. *International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology*, 4(5), 1446-1451.
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 1-8.
- Vianna, G. M., Zeller, D., & Pauly, D. (2020). Fisheries and policy implications for human nutrition. *Current Environmental Health Reports*, 7, 161-169.
- Wulandari, S., Saptorianoro, P., Setyowati, K., & Marlina, M. (2023). Pilihan Rasional Nelayan Desa Bendar, Pati, Jawa Tengah: Studi Etnografi Permasalahan Kenelayanan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 18(1), 25-34.
- Zulham, A., Pramoda, R., & Shafitri, N. (2022). Pengorganisasian nelayan skala kecil di zona penangkapan ikan perikanan industri dalam mendukung rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(2), 89-101.